

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, INTEGRITAS DAN ASIMETRI INFORMASI PADA KECURANGAN AKUNTANSI

Ni Komang Linda Lestari¹
Ni Luh Supadmi²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: lestarilindanikomang@gmail.com/ /Telp : 081999067066

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan *good governance* yaitu akuntabilitas. Untuk mewujudkan *Good Governance* diperlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya. SKPD merupakan instansi pemerintah daerah yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Laporan keuangan pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Kecurangan akuntansi merupakan suatu hal yang sering terjadi baik itu di sektor BUMN maupun organisasi. Tindakan tersebut tentunya merugikan *stakeholder*. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi antara lain pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi di OPD Kabupaten Klungkung. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai OPD Kabupaten Klungkung. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 62 responden. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian Internal dan Integritas berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Akuntansi di OPD Kabupaten Klungkung, sedangkan Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap Kecurangan Akuntansi di OPD Kabupaten Klungkung.

Kata kunci : Pengendalian Internal, Integritas, Asimetri Informasi, Kecurangan Akuntansi

ABSTRACT

Good governance is a prerequisite for every government to fulfill people's aspirations and achieve the goals and ideals of the nation and state. The basic principle in the implementation of good governance is accountability. To realize Good Governance required a Regional Device Work Units (SKPD) qualified and competent in their field. SKPD is a local government agency that receives and uses the budget to carry out its main duties and functions. Government financial statements are a representation of the financial position of transactions conducted by the government. Accounting fraud is a common occurrence in both the SOE sector and the organization. Such actions would be detrimental to stakeholders. Factors that influence the occurrence of accounting fraud include internal control, integrity and information asymmetry. The purpose of this study is to obtain empirical evidence on the influence of internal control, integrity and information asymmetry against accounting cheating in OPD Klungkung District. Population in this research is officer OPD Klungkung Regency. The number of samples used in

this study were 62 respondents. Sample determination was done by using purposive sampling technique. The data were collected by questionnaire method. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that Internal Control and Integrity have negative effect on Accounting Fraud in OPD Klungkung Regency, while Information Asymmetry has positive effect on Accounting Fraud in OPD Klungkung Regency.

Keywords: *Internal Control, Integrity, Information Asymmetry, Accounting Fraud*

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan *good governance* yaitu akuntabilitas. Untuk mewujudkan *Good Governance* diperlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya. SKPD merupakan instansi pemerintah daerah yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan sebutan atau istilah, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD mempunyai kewajiban untuk membuat akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Dewi, 2017). Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat mengenai aktivitas keuangan di institusi pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan sangat penting karena dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan rencana kegiatan untuk periode selanjutnya. Mengingat pentingnya informasi yang ada dalam laporan keuangan, maka laporan keuangan harus disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Pada tahun 2017 untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Klungkung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2016. Meskipun Pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh opini WTP, bukan berarti tidak ada permasalahan yang ditemukan. BPK menemukan beberapa kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dikutip dari *www.denpasar.bpk.go.id* pada tanggal 3 Juni 2017.

Tuntutan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tidak menutup kemungkinan akan adanya kecurangan-kecurangan dari pemerintah. Kecurangan yang dilakukan dapat berupa penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Pada organisasi sektor publik khususnya pemerintahan, kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berita mengenai KKA bagi masyarakat bukan menjadi rahasia lagi karena dapat dijumpai di media massa, seperti media cetak (surat kabar dan majalah), media elektronik (radio dan televisi), dan media massa internet. Kasus *fraud* banyak terjadi berawal dari kecurangan akuntansi yang lebih mengarah pada tindak korupsi. Tindak korupsi yang sering kali dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Menurut *Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, kecurangan akuntansi tersebut dapat digolongkan menjadi tiga jenis: kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva dan korupsi. Kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh tingkat korupsi suatu negara (Gaviria, 2001). Beberapa kasus kecurangan yang pernah terjadi di Kabupaten Klungkung yaitu: pertama, mantan Bupati Klungkung ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa senilai Rp. 17 miliar; kedua, mantan Sekda Klungkung dalam kasus korupsi dana Koni sebesar Rp. 1,8 milyar, dikutip dari www.infokorupsi.com tanggal 18 Juli 2014.

Perilaku kecurangan dijelaskan oleh *Fraud Triangle Teory*. Seseorang melakukan kecurangan karena adanya tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Menurut Dorminey *et al.* (2011), faktor rasionalisasi dan tekanan merupakan karakteristik pelaku kecurangan akuntansi yang tidak dapat diobservasi karena mustahil untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh pelaku ketika akan melakukan kecurangan akuntansi. Menurut Lou *et al.* (2009) rasionalisasi ini diprosikan dengan adanya kesenjangan integritas manajemen dan hubungan yang tidak baik antara

manajer dan auditor. Selain itu, adanya faktor kesempatan atau peluang dapat menyebabkan pelaku dengan leluasa melakukan tindak kecurangan. Hal ini dapat terjadi karena sistem pengendalian internal yang lemah dalam instansi pemerintah tersebut.

Untuk menangani masalah kecurangan akuntansi diperlukan monitoring. Untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif (Wilopo, 2006). Sistem pengendalian internal memegang peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil (Dewi, 2017). Lane and O'Connell (2009) menegaskan bahwa jika bentuk penekanan untuk mengikuti SPI diperhatikan secara khusus, akan mengurangi *fraud*. Menurut Arens *et al.* (2008), pengendalian internal meliputi lima elemen yaitu lingkungan pengendalian, penilai risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Elemen-elemen tersebut membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecurangan akuntansi, dengan adanya pengendalian internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Hasil penelitian Pramudita (2013) dan Mustikasari (2013) menemukan bahwa keefektifan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Sedangkan penelitian

Kusumastuti dan Meiranto (2012) menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui perilakunya (Schlenker, 2008). Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab. Fenomena skandal keuangan atau kecurangan akuntansi yang terjadi juga dapat menunjukkan suatu bentuk kegagalan integritas laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Integritas pelayanan publik merupakan wujud komitmen pemerintah guna memberikan layanan yang prima kepada masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan jauh dari kecurangan-kecurangan.

Hasil survei integritas sektor publik tahun 2014 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan indeks integritas unit layanan di Kementerian/Lembaga pada 2014 mencapai 7,22, di atas standar minimal yang ditetapkan oleh KPK, yakni 6,00. Indeks ini terdiri dari indeks pengalaman integritas dan indeks potensi integritas. Meskipun indeks integritas sudah melampaui nilai yang ditetapkan, unit layanan tetap perlu memperbaiki dan memberikan layanan optimal bagi pengguna layanan. Caranya, bisa dengan edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat, mengomunikasikan untuk memanfaatkan sarana media yang ada, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, dalam rangka menciptakan

pelayanan yang transparan, serta upaya yang lebih serius dalam menghilangkan praktik gratifikasi dalam layanan, dikutip dari *www.kpk.go.id* tanggal 18 November 2014.

Selain faktor pengendalian internal dan integritas, kecurangan akuntansi dalam pemerintah juga dapat terjadi karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal dan pemegang saham lainnya. Menurut Rahmawati (2012), Asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Asimetri informasi dapat menimbulkan kecurangan akuntansi di pemerintahan dan biasanya dapat terjadi pada saat proses penyusunan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah. Bila terjadi asimetri informasi, maka kesempatan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan akan semakin besar. Hasil penelitian Wilopo (2006) dan Mustikasari (2013) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Sedangkan menurut penelitian Kusumastuti dan Meiranto (2012) asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen disebut dengan *agency problems*. Salah satu penyebab

agency problems adalah adanya asimetri informasi. Menurut Miranti Senja (2011), Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut menyebabkan prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Dalam keadaan seperti ini prinsipal membutuhkan informasi yang dimiliki oleh agen mengenai keadaan perusahaan dan kinerja agen itu sendiri. Sehingga asimetri membuat manajemen bertindak tidak etis dan cenderung berlaku curang dengan memberikan informasi yang bermanfaat bagi prinsipal demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi.

Menurut Ayuningtyas (2012), teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya yang dipengaruhi oleh kekuatan internal dan juga kekuatan eksternal yang akan mencerminkan perilaku kepemimpinan seseorang tersebut. Kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha, dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila ada peluang untuk melakukan hal tersebut. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang efektif dalam suatu instansi diharapkan mampu meminimalisasikan tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh seseorang demi keuntungan pribadi. Teori atribusi menjelaskan tindakan seorang pemimpin maupun orang yang diberikan wewenang disebabkan oleh atribut penyebab. Tindakan yang tidak etis dan tindakan curang dapat dipengaruhi oleh adanya sistem pengendalian internal dan monitoring oleh atasan.

Menurut Abiola (2013) sistem pengendalian intern dapat digambarkan sebagai keseluruhan sistem kontrol, keuangan dan sebaiknya ditetapkan oleh manajemen untuk meneruskan usaha dari perusahaan agar tetap berjalan tertib dan efisien. Penelitian Adelin (2013) menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, artinya semakin efektif pengendalian internal perusahaan, semakin rendahnya kecenderungan kecurangan akuntansi perusahaan. Penelitian Zainal (2013) efektivitas pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan hasil penelitian Pramudita (2013) dan Mustikasari (2013) menemukan bahwa keefektifan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.

H_1 : Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Akuntansi.

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Mulyadi (2002) mendefinisikan integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Pope (2008) menjelaskan bahwa saat ini pendekatan yang paling ampuh untuk memberantas korupsi di seluruh dunia masih berada pada upaya untuk meningkatkan standar tata pemerintahan dengan menggunakan Sistem Integritas Nasional. Lembaga *Transparency International* (2014) (dalam Dewi, 2017) menjelaskan bahwa Sistem Integritas Nasional adalah sistem yang didalamnya terdiri atas pilar-pilar para penyelenggara sistem pemerintahan atau keorganisasian, yang mana dalam pelaksanaannya menjunjung tinggi integritas demi tegaknya kewibawaan institusi tersebut. Prinsip integritas mengharuskan seseorang untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, keberanian, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberi dasar dalam mengambil suatu keputusan yang dapat diandalkan. Penelitian Dewi (2017) menunjukkan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

H₂ : Integritas berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Akuntansi.

Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah problem yang muncul bila keinginan atau tujuan dari

prinsipal dan agen bertentangan, dan juga disaat prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen.

Adanya asimetri informasi memungkinkan terjadinya konflik antara prinsipal dan agen untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Karena terjadinya asimetri informasi antara atasan dan bawahan dapat mempengaruhi laporan keuangan yang bisa menyebabkan kecurangan. Menurut Khang (2002) bila terjadi asimetri informasi, manajemen perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lain-lain. Najahningrum (2013) menyatakan bahwa apabila terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Untuk mengatasi hal tersebut, kedua belah pihak bisa mengatur kembali kontrak yang disepakati dalam rangka memberikan motivasi agar dapat mengikuti prosedur kerja dan aturan akuntansi yang berlaku. Penelitian Najahningrum (2013) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

H_3 : Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap Kecurangan Akuntansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menganalisis data yang bersifat

kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014:14). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Klungkung dengan subjek penelitian pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Kabupaten Klungkung. Alasan pemilihan Kabupaten Klungkung sebagai tempat penelitian karena Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai peraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Walaupun Pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh opini WTP, bukan berarti tidak ada permasalahan yang ditemukan oleh BPK. Terdapat beberapa kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Objek dalam penelitian ini adalah Kecurangan Akuntansi yang dijelaskan oleh Pengendalian Internal, Integritas dan Asimetri Informasi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kecurangan akuntansi (Y). Kecurangan Akuntansi merupakan kesengajaan melakukan tindakan merugikan untuk memperoleh keuntungan dengan cara memanipulasi sehingga melaporkan laporan keuangan tidak sesuai keadaan sebenarnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengendalian internal (X_1), integritas (X_2) dan asimetri informasi (X_3). Pengendalian Internal diartikan sebagai kontrol didalam suatu organisasi yang bertujuan mengarahkan dan mengawasi sumber daya organisasi yang diharapkan dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Integritas merupakan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Asimetri informasi dapat menggambarkan perbedaan informasi yang dimiliki oleh atasan dan bawahan pada instansi pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan dua data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data dalam berbentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan satuan hitung (Sugiyono, 2014:14). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil pengisian kuesioner. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2014:14). Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambaran umum Kabupaten Klungkung, jumlah OPD Kabupaten Klungkung dan struktur OPD yang didapatkan dari *website* Kabupaten Klungkung. Selain itu penelitian ini juga menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder.

Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul, melalui hasil pengisian kuesioner. Penelitian ini dalam pengolahan data menggunakan data primer dengan mengedarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi oleh responden. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden pada kuesioner. Data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya yang dikumpulkan oleh orang atau pihak lain di luar peneliti sendiri. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data berupa jumlah jumlah OPD Kabupaten Klungkung dan struktur OPD yang didapatkan dari *website* Kabupaten Klungkung.

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh OPD Kabupaten Klungkung berdasarkan pusat data Kabupaten Klungkung yaitu sebanyak 31 OPD. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai OPD Kabupaten Klungkung. Responden dalam penelitian ini yaitu masing-masing OPD sebanyak 2 orang. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive*

sampling menurut Sugiyono (2014:122) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga layak dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan staf bagian keuangan tiap-tiap OPD. Pemilihan sampel tersebut karena jabatan tersebut bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan dan memiliki otoritas dalam mengelola keuangan sebuah OPD yang di dalamnya termasuk perencanaan, penggunaan, pencairan serta pelaporan anggaran.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Uji Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen dari data penelitian berupa jawaban responden telah dijawab dengan benar atau tidak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2012). Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Secara statistik hal ini dapat diukur dari koefisien nilai determinasi, nilai statistik f. Persamaan model regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- Y : Kecurangan Akuntansi
- α : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_3$: Koefisien Regresi

X_1 : Pengendalian Internal
 X_2 : Integritas
 X_3 : Asimetri Informasi
 e : *error*

Asumsi klasik adalah suatu pengujian hipotesis yang digunakan dalam suatu penelitian yang menunjukkan bahwa model regresi tersebut layak atau tidak untuk dilakukan ke pengujian selanjutnya. Uji Asumsi klasik bertujuan untuk menguji kelayakan model yang dibuat sebelum melakukan model regresi. Uji asumsi klasik dilakukan dengan melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau yang mendekati normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bermakna (korelasi) antara setiap variabel bebas dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika suatu model regresi terdapat gejala multikolinearitas dan dipaksakan untuk digunakan, maka akan memberikan hasil prediksi yang menyimpang. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak

terjadi heteroskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas akan menimbulkan variabel prediktor akan menjadi tidak efisien.

Ketepatan dari fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual diukur dari *goodness of fit*-nya (Ghozali, 2012:97). Secara statistik, hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik F (uji kelayakan model), dan nilai statistik t (uji signifikansi parameter individual). Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penghitungan statistik ini, nilai R^2 yang digunakan adalah adjusted R^2 karena ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pengaruh penambahan satu variabel independen kedalam satu persamaan regresi. Nilai dari adjusted R^2 benar-benar menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi atau kuadrat dari koefisien korelasi memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1 atau $0 < R^2 < 1$. Koefisien determinasi sama dengan satu berarti variabel independen berpengaruh secara sempurna terhadap variabel dependen dan jika koefisien determinasi = 0 berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Uji statistik F digunakan untuk menguji kelayakan atau validitas dari suatu model regresi berganda dan untuk mengetahui apakah model penelitian dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Kriteria penilaian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi F_{hitung} dengan nilai signifikansi α . Apabila nilai signifikansi F_{hitung} kurang dari $\alpha = 0,05$ maka model penelitian dapat atau layak digunakan. Uji t digunakan untuk

mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian tersebut adalah dijelaskan sebagai berikut. Untuk melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal dapat dilihat dengan uji non parametrik satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* dalam hasil pengujian regresi. Uji normalitas dengan menggunakan uji non parametrik satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* bertujuan untuk meyakinkan apakah residual dapat terdistribusi dengan normal dan independen. Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,582. Karena *Asymp. Sig (p-value)* 0,582 lebih besar daripada α (0,05) maka dapat diinterpretasikan bahwa residual dari model telah berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya dalam satu model. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami multikolinearitas. Nilai *tolerance* variabel bebas tidak ada yang kurang dari 10 persen (0,1) dan seluruh variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data penelitian ini, tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi ini. Pengujian heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak

terjadinya heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan *Uji Glejser*, yaitu dengan meregres variabel bebas terhadap absolut residual. Karena nilai Sig. lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X1, X2, dan X3) terhadap *absolute residual* (abs_res) . Dengan demikian model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk memprediksi.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui dan menunjukkan arah serta besarnya pengaruh pengendalian internal, integritas, dan asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi. Dalam model analisis pada penelitian ini, yang digunakan sebagai variabel bebas adalah adalah pengendalian internal (X₁), integritas (X₂), dan asimetri informasi (X₃). Sedangkan yang digunakan sebagai variabel terikat pada penelitian ini adalah kecurangan akuntansi (Y). Analisis ini menggunakan bantuan SPSS Statistics 21.0 dalam pengolahan. Hasil uji regresi linear berganda disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	35,942	4,305		8,348	0,000
Pengendalian Internal	-0,151	0,058	-0,362	-2,618	0,011
Integritas	-0,296	0,112	-0,384	-2,654	0,010
Asimetri Informasi	0,299	0,138	0,232	2,169	0,034
F hitung	:	17,433			
Signifikansi F	:	0,000			
R Square	:	0,474			
Adjusted R Square	:	0,447			

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan hasil analisis dapat diartikan bahwa Konstanta sebesar 35,942 menyatakan bahwa apabila tidak terdapat pengaruh dari pengendalian internal dan integritas dan terdapat pengaruh dari asimetri informasi maka variabel kecurangan akuntansi (Y) pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Klungkung bernilai sebesar 35,942. Koefisien regresi variabel pengendalian internal (X_1) -0,151. Hal ini berarti bahwa apabila variabel pengendalian internal (X_1) meningkat, maka akan mengakibatkan penurunan pada kecurangan akuntansi, dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

Koefisien regresi variabel integritas (X_2) -0,296. Hal ini berarti bahwa apabila variabel integritas (X_2) meningkat, maka akan mengakibatkan penurunan pada kecurangan akuntansi, dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan. Koefisien regresi variabel asimetri informasi (X_3) 0,299. Hal ini berarti bahwa apabila variabel asimetri informasi (X_3) meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan pada kecurangan akuntansi, dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R²* adalah sebesar 0,447. Hasil ini berarti bahwa 44,7 persen variasi besarnya kecurangan akuntansi dapat dijelaskan oleh pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi. Sedangkan sisanya sebesar 55,3 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, satu hal yang perlu diperhatikan adalah kelayakan model penelitian yang dilakukan dengan uji F untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh pada variabel dependen. Jika nilai $\text{sig } F < \alpha = 0,05$ berarti variabel independen memengaruhi variabel dependen. Variabel independen layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen, sehingga pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan.

Hasil analisis kelayakan model F dapat dilihat pada Tabel 4.13. Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 17,433 dengan nilai signifikansi uji F yaitu sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan makna bahwa variabel pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi berpengaruh pada kecurangan akuntansi. Artinya ketiga variabel independen mampu memprediksi atau menjelaskan kecurangan akuntansi di OPD Kabupaten Klungkung.

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif pada kecurangan akuntansi. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Ini ditunjukkan oleh koefisien variabel pengendalian internal sebesar -0,151 dengan nilai t-hitung sebesar 2,618 pada *sig.* sebesar 0,011. Koefisien pengendalian internal yang sudah distandarisasi ditunjukkan dengan nilai beta sebesar -0,362. Hal ini berarti pengaruh langsung pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi adalah 36,2 persen. Hal ini berarti semakin baik pengendalian internal pada OPD, maka tingkat kecurangan akuntansi semakin menurun. Apabila pengendalian internal buruk pada

OPD, menyebabkan tingkat kecurangan akuntansi semakin meningkat. Jika ada pengawasan dan evaluasi atas aktivitas-aktivitas operasional secara terus-menerus dalam instansi, akan dapat membantu dalam mengatasi tindakan kecurangan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh negatif pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi terbukti kebenarannya. Hasil ini mendukung hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adelin (2013), Zainal (2013) dan Zulkarnain (2013) yang menyatakan pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Dengan adanya pengendalian internal di dalam suatu organisasi kemungkinan akan mengurangi terjadinya kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan bagaimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh kekuatan internal dan eksternal yang akan mencerminkan perilaku kepemimpinannya Hasil penelitian juga didukung oleh *fraud triangle theory* yang menjelaskan faktor penyebab seseorang melakukan kecurangan diantaranya faktor tekanan, faktor kesempatan dan faktor alasan pembenaran. Pengendalian internal yang diharapkan mampu mengurangi perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi tidak lepas dari kebijakan, prosedur, dan pengawasan antara pimpinan dan bawahan.

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa integritas berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Ini ditunjukkan oleh koefisien

variabel Integritas sebesar $-0,296$ dengan nilai t -hitung sebesar $2,654$ pada $sig.$ sebesar $0,010$. Koefisien integritas yang sudah distandarisasi ditunjukkan dengan nilai beta sebesar $-0,384$. Hal ini berarti pengaruh langsung integritas terhadap kecurangan akuntansi adalah $38,4$ persen. Hal ini berarti semakin tinggi integritas, maka kecurangan akuntansi semakin rendah. Jika seseorang memiliki komitmen untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan prinsip yang benar dan etis, sesuai dengan nilai dan norma, dan ada konsistensi untuk tetap melakukan komitmen, hal tersebut akan menjauhkan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh negatif integritas terhadap kecurangan akuntansi terbukti kebenarannya. Hasil ini mendukung hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) yang menunjukkan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Integritas menjadi pilar penyelenggaraan sistem pemerintahan untuk mewujudkan kewibawaan institusi.

Hasil statistik deskriptif variabel integritas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju atas pernyataan yang menjadi indikator integritas meliputi kejujuran, keberanian, sikap bijaksana dan tanggungjawab. Teori atribusi mendukung sikap integritas menjadi dasar kepercayaan publik dan prinsip moral bagi seseorang untuk mengurangi perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian didukung juga oleh *fraud triangle theory* yang menjelaskan, seorang

karyawan yang memiliki integritas tinggi tidak akan mempengaruhi pekerjaan mereka walaupun terdapat tekanan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Ini ditunjukkan oleh koefisien variabel asimetri informasi sebesar 0,299 dengan nilai t-hitung sebesar 2,169 pada *sig.* sebesar 0,034. Koefisien asimetri informasi yang sudah distandarisasi ditunjukkan dengan nilai beta sebesar 0,232. Hal ini berarti pengaruh langsung asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi adalah 23,2 persen. Hal ini berarti semakin tinggi asimetri informasi, maka kecurangan akuntansi dilakukan oleh aparat akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh positif asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi ini memiliki arti bahwa, setiap kecurangan akuntansi akan cenderung meningkat apabila asimetri informasi sering terjadi dalam suatu instansi. Hasil ini mendukung hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Wilopo (2006), Najahningrum (2013) dan Mustikasari (2013) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Hasil penelitian ini juga didukung *fraud triangle theory* yang menjelaskan penyebab terjadinya kecurangan disebabkan adanya tekanan dan kesempatan dari pihak pegawai ataupun manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan dan rasionalisasi atau sikap yang tidak jujur yang dimiliki seseorang dapat menyebabkan kecurangan itu terjadi. Teori keagenan juga mendukung hasil

penelitian ini, teori ini menjelaskan permasalahan terjadi akibat adanya kesenjangan informasi antara prinsipal dengan agen. Adanya asimetri informasi akan memicu tindakan kecurangan dari para staf. Pimpinan menjadi penentu apakah kecurangan dapat diminimalisir atau tidak. Setiap informasi yang berkaitan dengan instansi seharusnya disampaikan kepada staf dengan merata, sesuai dengan bidangnya masing-masing, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada staf. Apabila rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan telah tumbuh, maka kecurangan akan dapat dihindari.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dari bab dapat disimpulkan pengendalian Internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Adanya pengawasan dan evaluasi atas aktivitas-aktivitas operasional secara terus-menerus dalam instansi dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi. Integritas mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Jika seseorang memiliki komitmen untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan prinsip yang benar dan etis, sesuai dengan nilai dan norma, dan ada konsistensi untuk tetap melakukan komitmen, hal tersebut akan menjauhkan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan akuntansi. Asimetri Informasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Setiap kecurangan akuntansi akan cenderung meningkat apabila asimetri informasi sering terjadi dalam suatu instansi.

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan beberapa saran OPD Kabupaten Klungkung agar mempertahankan peraturan, dan lebih intensif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan sebagai upaya melakukan pengendalian internal, diharapkan untuk pegawai terkait tetap menjaga integritas yang dimiliki untuk meminimalisir perilaku-perilaku tidak etis dan bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian di lokasi penelitian yang berbeda sebagai perbandingan dengan penelitian ini, menambahkan kepala dinas sebagai responden, menambahkan metode wawancara dan disarankan untuk meneliti faktor lain yang mempengaruhi kecurangan akuntansi seperti pemerataan informasi.

REFERENSI

- Abiola, Idowu. 2013. Internal Control System on Fraud Detection: Nigeria Experience. *Journal of Accounting and Finance* vol. 13(5).
- Adelin, Vani. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada BUMN di Kota Padang). *Jurnal*. Universitas Negeri Padang.
- Albrecht, S. W dan C. Albrecht. 2004. *Fraud Examination and Prevention*. Australia: Thomson, South-Western.
- Aranta, Petra Zulia. 2013. Pengaruh Moralitas Aparat Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal*. Universitas Negeri Padang.
- Arens *et al.* 2008. *Auditing dan jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta: Erlangga.
- Ariani, Ketut Sulasmi. 2014. Analisis Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Di Pdam Kabupaten Bangli. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 2 No: 1.

- Association of Certified Fraud Examiner. 2014. *Report To The Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Canada: Global Headquarters.
- Ayuningtyas, Harvita Yulian. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Audit. *Journal of Accounting*. Diponegoro. Vol. 1 No.2.
- Boynton *et al.* 2006. *Modern Auditing*. 8th Edition. USA. Richard D. Irwin Inc.
- Busuioc, Andrada dan Ristian Radu Birau. 2011. The Role of Information Asymmetry in The Outburst and The Deepening of The Contemporary Economic Crisis. *Academy of Economic Studies Journal*, pp:891-902.
- Coram *et al.* 2008. Internal audit, alternative internal audit tructures and the level of misappropriation of assets fraud. *Accounting and Finance* vol. 48.
- Dewi, Kadek Yuli Kurnia. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal Dan Integritas Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-journal*. Universitas Udayana.
- Dorminey *et al.* 2011. Beyond The Fraud Triangle. Enhancing Deterrence of Economic Crimes. *CPA Journal*.
- Gaviria, A. 2001. Assessing the Effects of Corruption and Crime on Firm Performance: Evidence from Latin American. Vol. 3(3), pp: 245-268.
- Ghozali, Imam, 2012. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Gunadi, Eddi M. 2001. Prevention And Detection Of Fraud a Challenge to the Internal Auditors. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 1 No. III Juni 2001: 43–49.
- Hanifa, Septia Ismah. 2015. Pengaruh Fraud Indicators Terhadap Fraudulent Financial Statement. *Jurnal*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Herman, Lisa Amelia. 2013. Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan. *Jurnal*. Universitas Negeri Padang.
- Hernandez, J. R. & T. Groot. 2007. Corporate Fraud: Preventive Controls Which Lower Corporate Fraud. *Amsterdam Research Centre in Accounting*.

- Husein, Umar. 2011. *Metode Pemilihan Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Info Korupsi. Eks Bupati Klungkung Tersangka Korupsi Dermaga Gunakasa. www.infokorupsi.com. Diunduh tanggal 28, bulan Februari, tahun 2017.
- Info Korupsi. Mantan Sekda Klungkung Terseret Kasus Korupsi. www.infokorupsi.com. Diunduh tanggal 28, bulan Februari, tahun 2017.
- Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016. www.denpasar.bpk.go.id. Diunduh tanggal 3, bulan Juni, tahun 2017.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. KPK Umumkan Survei Integritas Sektor Publik 2014. www.kpk.go.id. Diunduh tanggal 21, bulan Maret, tahun 2017.
- Lane, R., and O'Connell, B.T. 2009. The Changing face of regulators investigations into financial statement fraud. *Accounting Research Journal*. 22(2), pp: 118-143.
- Lin *et al.* 2003. A Fuzzi Neural Network for Assecing the Risk of Fraudulent Financial Reporting. *Managerial Auditing Journal*. 18(18), pp: 657-665.
- Lou *et al.* 2009. "Fraud Risk Factor of the Fraud Triangle Assesing the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting". *Journal of Bussines & Economic Research* volume 7 number 2.
- Mulyadi. 2002. *Auditing* (Buku 1). Ed 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustikasari, Dhermawati Putri. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*, ISSN: 2252-6765.
- Najahningrum, Anik Fatun. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Semarang.
- Pope, Jeremy. 2008. *Strategi Memberantas Korupsi*: Edisi Ringkasan, Alih Bahasa: TjahjonoEP. Jakarta: Transparency International Indonesia.

- Pramudita, Aditya. 2013. Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. *Accounting. Analysis Journal*, ISSN 2252-6765.
- Pristiyanti, Ika Ruly. 2012. Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi UNNES. Semarang.
- Simanjuntak, Riduan Ak, MBA, CISA, CIA. “Kecurangan: Pengertian dan Pencegahan” (diunduh dari www.tjukriaptawaf.blogspot.co.id tanggal 20 April 2017)
- Rukmawati, Afhita Dias. 2011. Persepsi Manajer dan Auditor Eksternal Mengenai Efektivitas Metode Pendeteksian dan Pencegahan Tindakan Kecurangan Keuangan. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Schlenker, B.R. 2008. Integrity and Character: Implications of Principled and Expedient ethical ideologis. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 27(10) 1078-1125.
- Scott, W. R., 2003. *Financial Accounting Theory*, 3rd edition. Toronto: Prentice Hall.
- Senja Miranti. 2011. “Pengaruh Asimetri Informasi, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba di PT BEI”. *Jurnal S1*. FE UNP.
- Singleton & Singleton. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Fourth Edition Wiley Corporate F&A.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukriah, Ika, Akram, dan Biana Adha Inapty. 2009. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. *Simposium Nasional Akuntansi 12*. Palembang.
- Transparency International Indonesia (TII). 2014. *Indonesia Bersih Uang Pelicin*. Jakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2013. *Corporate Fraud & Internal Control*. Jakarta: Harvarindo Association of Certified Fraud Examiners.
- Tuanakotta, Theodorus. 2007. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Usman, Husaini. Akbar, R. Purnomo Setiady. 2006. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wells, J. T. 2007. *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection: Second Edition*. John Wiley and Sons Inc.
- Willopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Studi Pada Perusahaan Publik dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. *SNA IX*: Padang.
- Zainal, Rizki. 2013. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*) (Studi Empiris Kantor Cabang Bank Pemerintah Dan Swasta Di Kota Padang). *Jurnal*. Universitas Negeri Padang.
- Zulkarnain, Rifqi Mirza. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* pada Dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysys Journal AAJ1*(3).